

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

# Policy Brief Series

Issue 8 | Vol. 1 | 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG)  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## Pernyataan Masalah

Policy brief ini mengkaji pengalaman beberapa mantan teroris dan kombatan yang melakukan transformasi sebagai pemimpin-pemimpin komunitas dan memengaruhi ratusan kaum muda dan mantan teroris lainnya di seluruh Indonesia untuk meninggalkan kekerasan. Dukungan BNPT, Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan kelompok pengusaha di tingkat kabupaten, kota dan provinsi mendorong kepercayaan diri mereka dalam melakukan perubahan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Sayangnya, beberapa pemerintah daerah dan masyarakat cenderung apatis, tidak melibatkan dan mengintegrasikan diri mereka dalam kebijakan daerah yang sebetulnya penting dalam membangun komunitas muda yang damai, kuat dan produktif. Pencegahan keamanan juga penting dilakukan pada level regional Asia Tenggara, terutama di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina.

## Latar Belakang

Beberapa analis sepakat adanya hubungan antara pembangunan ekonomi dan *countering violent extremism* (CVE). Hubungan antara keamanan dan pembangunan “secara khusus terbukti ketika melihat di luar penafsiran tradisional keamanan nasional atas *human security*, termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, kesehatan dan kriminal lainnya.”<sup>1</sup> Sejumlah pemuda yang terjaring dalam penelitian ini menyediakan narasi tentang pemberdayaan ekonomi bagi pemuda menjadi kunci pencegahan aktivisme keagamaan yang berorientasi kekerasan.

Ali Fauzi (lahir di Lamongan, 15 November 1971), Arifudin Lako alias Brur (lahir di Poso, 20 September 1978), dan Khairul Ghazali (lahir di Medan, 29 April 1965) adalah mantan teroris

yang telah melakukan transformasi diri antara tahun 2006 dan 2010 dengan pola yang beragam, dan kini aktif dalam pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda dan anak-anak mantan teroris. Demikian juga Widodo (lahir di Semarang, 10 Juli 1986), seorang manajer Dapoer Bistik Solo, meski bukan dari napiter namun ia memiliki visi untuk menggerakkan kaum muda termasuk mantan napiter dalam kewirausahaan. Mereka tidak termasuk kelompok muda sebagaimana kriteria PBB dan UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Republik Indonesia, tetapi mereka menggerakkan dan menciptakan pengaruh kuat atas ratusan anak muda untuk meninggalkan terorisme.

John Horgan memandang perubahan pelaku terorisme berlangsung efektif dalam masa deradikalisasi di lapas dan setelah keluar dari lapas.<sup>2</sup> Pendekatan persuasif dan dialogis memberi mereka nuansa baru dan pencerahan atas pemikiran sebelumnya bahwa mereka lebih dirangkul. Hal yang berbeda dalam ajaran “anti pemerintah *thaghut*” yang pernah mereka dapatkan di kalangan kelompok teroris. Perubahan semakin kuat ketika mereka mendapatkan dukungan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan keterampilan, dan pemberian modal usaha untuk melanjutkan kehidupan yang damai dan produktif. Julie Chernov Hwang melakukan wawancara lebih dari lima puluh mantan teroris dan kombatan di Indonesia termasuk Brur dan Fauzi. Chernov Hwang menyatakan “*psychological process that propel individual militants to turn away from violence*” (proses psikologis yang mempengaruhi militan secara individu untuk keluar dari kekerasan).<sup>3</sup> Bagi Chernov Hwang Brur, Fauzi dan Ghazali memiliki alasan individu yang kuat melalui agama, keluarga dan interaksi sosial di lapas dan setelah keluar dari lapas meyakinkan

1 Eelco Kessels and Christina Nemr, “Countering Violent Extremism and Development Assistance Identifying Synergies, Obstacles, and Opportunities,” Policy Brief, February 2016, Global Center on Cooperative Security. Accessed on January 04, 2018 from <http://www.global-center.org/wp-content/uploads/2016/01/Feb-2016-CVE-and-Development-policy-brief.pdf>.

2 John Horgan, “Deradicalization or disengagement? A Process in Need of Clarity and a Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation,” *International Journal of Social Psychology*, Vol. 24, Isu 2, 2009.

3 Julie Chernov Hwang, *Why Terrorists Quits: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 2018; Julie Chernov Hwang, “The Disengagement of Indonesian Jihadists: Understanding the Pathways,” *Terrorism and Political Violence*, Vol. 29, Isu 2, 2017.

mereka untuk sepenuhnya berubah menjadi individu yang komitmen dalam menciptakan perdamaian, kerja-kerja sosial ekonomi, dan pendidikan.

Fauzi, Lako dan Ghazali memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di komunitas mereka. Mereka mendirikan lembaga komunitas dan pendidikan sebagai wadah bersama dan wahana pendidikan, pelajaran yang baik, pelatihan ekonomi, dan dukungan membangun kewirausahaan yang berkesinambungan.

Di samping inisiatif mandiri dalam membangun komunitas yang kuat, mereka juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat lokal dan pemerintah. Kritik dan masukan mereka atas kebijakan penanggulangan terorisme sangat berguna untuk membuat kebijakan yang komprehensif dan efektif dengan melibatkan lebih banyak *stakeholder*.

Policy brief ini berasal dari cerita lapangan di Lamongan, Poso, dan Medan, dimana ratusan kaum muda mantan teroris berkomitmen meninggalkan lingkaran jihad kekerasan. Analisis juga dilakukan terhadap pandangan mereka atas isu-isu strategis terkait ekonomi bagi kaum muda dan bagaimana hal ini penting sebagai pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Argumen makalah kebijakan ini adalah kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah, kementerian, organisasi keagamaan dan masyarakat dunia usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin efektifitas penanggulangan terorisme dan ekstremisme.

## Metodologi

Policy brief ini didasarkan pada wawancara mendalam atas hampir 100 responden di lima provinsi di Indonesia yang terdiri dari mantan teroris, mantan napiter, mantan kombatan, staf pemerintah, pimpinan masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi keagamaan dan

masyarakat bisnis. Studi ini dilakukan di Lamongan-Jawa Timur, Poso-Sulawesi Tengah, Medan-Sumatra Utara, Solo-Jawa Tengah, dan Nunukan-Kalimantan Utara pada 15 Agustus sampai 22 Januari 2018.

## Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme

Mengacu pada batasan umur kaum muda menurut PBB antara 15-24 tahun. Sedikit berbeda dengan UU no. 40 tahun 2009 dikatakan pemuda “warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun” (BPS 2015). Jumlah pemuda Indonesia sekitar 65 juta atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) menyatakan bahwa pemuda yang berumur 15-24 di Asia Pasifik berjumlah lebih dari 750 juta atau sekitar 60 persen dari total pemuda dunia.<sup>4</sup>

Kondisi kaum muda di Indonesia dan Asia Pasifik akan memberi pengaruh besar atas kaum muda di wilayah lain. Tingkat intoleransi dan radikalisme kaum muda Indonesia, khususnya siswa dan mahasiswa berada pada level yang mengkhawatirkan. Survei Nasional tentang Keberagaman Sekolah dan Universitas di Indonesia pada 2017 ditemukan 23.35 % siswa dan mahasiswa menyatakan “aksi teror melalui bom bunuh diri diakui dalam Islam,” dan 37.71 % mengakui “Jihad adalah nilai dalam Islam yang ditujukan kepada non Muslim.”<sup>5</sup> Mayoritas mereka menilai kondisi ekonomi dan kesenjangan kaya miskin sangat parah, dengan persentase jumlah responden yang setuju mencapai 52.29 % dan 43.46 % menyatakan kondisi perekonomian Indonesia cukup parah. Sikap dan opini intoleran dan radikal, disertai penilaian atas kondisi ekonomi yang tidak kondusif akan menjadi target empuk

4 “Youth in Asia Pacific”, diakses pada 7 Februari 2018 dari <http://www.unescap.org/resources/youth-asia-pacific>.

5 “Api dalam Sekam Keberagaman Gen Z,” Survei Nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia pada 2017 oleh PPIM UIN Jakarta.

bagi kelompok jihadis dan teroris mengarahkan kaum muda dalam aksi terorisme.

The Global Youth Wellness Index 2017 menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari upaya memberi kesempatan kaum muda dalam partisipasi ekonomi dengan menempati peringkat 3 paling bawah di Asia Pasifik dalam aspek “economic opportunity” bagi kaum muda (peringkat 20). Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 10 dalam aspek kesejahteraan kaum muda, masih pada level tengah di antara negara-negara Asia. Indonesia kuat pada “civic engagement” tetapi sangat lemah pada kesempatan ekonomi, kesetaraan gender dan TIK.<sup>6</sup> Partisipasi kaum muda dalam sosial politik serta inisiatif mereka dalam program pemberdayaan ekonomi memberi harapan akan bagaimana aspek ini menjadi kekuatan dalam membendung radikalisme dan terorisme melalui program ekonomi. Fauzi, Brur, Ghazali dan Widodo dengan keterbatasan dana menggerakkan komunitas muda dalam melakukan usaha dan penguatan keterampilan ekonomi lainnya bagi kaum muda Indonesia. Brur bahkan juga menyentuh pada aspek lintas komunitas berbeda agama sebagai harapan Poso bebas dari potensi konflik.

## Program Ekonomi

Pemerintah dan masyarakat sipil telah memprakarsai program penguatan ekonomi bagi kaum muda seluruh Indonesia. Ini termasuk ekonomi kaum muda dalam rangka penanggulangan terorisme dan ekstremisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendominasi program, diikuti oleh Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta kementerian dan lembaga lainnya. Sejumlah kecil kelompok dunia usaha bergabung membantu mantan teroris terintegrasi dalam masyarakat dengan menerima mereka dalam bekerja atau bergabung dalam jaringan komunitas wirausaha muda yang kuat dan kreatif.

<sup>6</sup> “The Global Youth Wellbeing Index 2017” diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

BNPT melakukan pemberdayaan ekonomi bagi sejumlah besar kaum muda mantan teroris. Ali Fauzi misalnya, mantan instruktur Mujahidin Mindanao mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) pada Agustus 2015, dan mengkoordinasikan lebih dari lima puluh mantan teroris dan mantan kombatan. BNPT mengalokasikan program memulai usaha, pelatihan peternakan sapi, kuliner, pertanian dan keterampilan lain untuk membantu mereka teintegrasi dalam masyarakat. Kementerian Sosial juga memberi dana bagi mantan teroris membangun kewirausahaan mereka. Beberapa anggota komunitas YLP menyatakan bahwa bantuan program ekonomi yang datang dari BNPT, pemerintah dan masyarakat telah membentuk kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan hidup dan meninggalkan jihad kekerasan pada masa lalu. “Kami juga menolak bergabung kembali termasuk bersama ISIS setiap kali mereka mendekati kami,” lanjut mereka dalam FGD di Lamongan. Ali Fauzi menyadari upayanya positif bagi komunitas mantan teroris tidak hanya di Lamongan tetapi juga seluruh Indonesia. Banyak mantan teroris dari luar Jawa Timur menghubunginya untuk berkonsultasi bagaimana keluar dari lingkaran kekerasan.<sup>7</sup>

Contoh lain adalah Khairul Ghozali. Mantan teroris yang pernah terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus 2010 di Medan ini kini melakukan perubahan menjadi pendidik bagi anak-anak mantan teroris. Ghozali mencoba memutus rantai generasi teroris dengan mendidik anak-anak melalui kurikulum yang inklusif di madrasah. Ghozali mendirikan Pesantren Al Hidayah, salah satu dari sedikit pesantren yang memiliki orientasi merehabilitasi teroris atau siswa yang rentan terhadap terorisme. Pesantren Al Hidayah mendapatkan dana awal dari BNPT dengan menerima sekitar dua puluh santri, mayoritas dari anak-anak keluarga teroris. Ghozali menyangkan “saat ini pesantren kehabisan dana. Pemerintah dan masyarakat daerah tidak peduli dengan keberadaan pesantren ini.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ali Fauzi, wawancara di Lamongan, 4 September 2017.

<sup>8</sup> Khoirul Ghozali, wawancara di Medan, August 25, 2017.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan pesantren Al Hidayah ini.

## Monitoring dan Evaluasi

Arifudin Lako alias Brur, mantan teroris dari Poso, Sulawesi Tengah menyatakan program BNPT memiliki dampak terbatas bagi mantan kombatan di Poso. Hal ini disebabkan program ekonomi dilakukan dalam jangka pendek dan kadang tidak diatur dengan baik. Brur melihat “BNPT jarang melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang mereka dani. Banyak dana tersalurkan pada kelompok yang tidak tepat sasaran.”<sup>9</sup>

Senada dengan Brur, Hasanuddin, Direktur Yayasan Amanah Poso dan mantan napiter, melihat “pentingnya tokoh mantan napiter sebagai penanggungjawab yang memonitor dan memberikan evaluasi atas program BNPT.”<sup>10</sup> Hasanuddin juga melihat apa yang dilakukan Brur dalam komunitas Rumah Katu sangat positif bagi mantan kombatan dan kaum muda di Poso. Widodo, manajer Dapoer Bistik Solo (DBS), memiliki pengalaman berbeda dalam membina kaum muda termasuk mantan napiter dalam kewirausahaan di Solo. Widodo menginisiasi DBS sejak 2009 menyatakan bahwa “kaum muda dan mantan napiter mendapatkan kesempatan bekerja. Ini penting tidak hanya menghapus stigma negatif bagi mantan napiter tetapi memberi energi positif bagi mereka untuk terintegrasi dalam masyarakat.”<sup>11</sup> Widodo juga menilai pemerintah masih kurang maksimal dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi secara komprehensif dan berkelanjutan.

BNPT, kementerian, pemerintah daerah dan lembaga lain terlibat dalam program ekonomi kaum muda mantan teroris dan mantan kombatan diharapkan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program dalam jangka panjang

dan berkesinambungan. Mereka membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program dan dampak lebih luas.

## Multi-stakeholder

Usaha-usaha dan kegiatan transformasi yang diprakarsai oleh Ali Fauzi, Brur dan Ghazali membutuhkan dukungan penuh dari semua *stakeholder*. Upaya BNPT dalam mendukung Pesantren Al Hidayah di Medan mestinya diikuti oleh pemerintah dan masyarakat lokal di Sumatera Utara bagaimana pesantren ini strategis bagi pencegahan anak-anak dan kaum muda dari terorisme dan ekstremisme. Selanjutnya, inisiatif Ali Fauzi dalam membangun komunitas yang kuat bagi mantan teroris membutuhkan kerjasama positif dari pemerintah daerah dan ormas agama di Lamongan dan Jawa Timur. Kerjasama antar *stakeholder* ini akan menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme bagi kaum muda. Kessler dan Nemr menyatakan: “pendekatan integratif potensial berperan lebih kuat dalam memperkuat ketahanan masyarakat atas ekstremisme kekerasan dan mengurangi faktor lain, termasuk marjinalisasi.”<sup>12</sup>

Sinergi kebijakan antar lembaga juga memiliki konteks regional dimana kaum muda khususnya diperbatasan Nunukan, Kalimantan Utara rentan sebagai target kelompok kriminal dan teroris. Sekitar tujuh puluh persen penghuni lembaga pemyarakatan di Nunukan terkait dengan perdagangan lintas batas narkoba. Demikian juga, kelompok lama Jama'ah Islamiah dan kelompok teroris baru ISIS masih menggunakan jalur tradisional untuk memasukkan senjata dari Mindanao ke Sabah dan Nunukan melibatkan anak muda sebagai asisten lokal. Indonesia, Filipina dan Malaysia didorong untuk melakukan kerjasama keamanan perbatasan. Dalam wawancara yang dilakukan di Nunukan ditemukan bahwa “Filipina dan Malaysia

9 Arifudin Lako, Wawancara di Poso, September 2017.

10 Hasanuddin, wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

11 Widodo, presentasi dalam Workshop Cisform-PST-PG-PPIM UIN-Convey Indonesia di Yogyakarta, 29 Januari 2018.

12 Eelco Kessels and Christina Nemr, “Countering Violent Extremism and Development Assistance Identifying Synergies, Obstacles, and Opportunities,” Policy Brief, February 2016, Global Center on Cooperative Security. Accessed on January 04, 2018 from <http://www.global-center.org/wp-content/uploads/2016/01/Feb-2016-CVE-and-Development-policy-brief.pdf>.

melakukan pembiaran atas barang yang masuk ke Indonesia. Ini termasuk menyelundupkan narkoba, komoditas ilegal dan senjata M-16.”<sup>13</sup>

## Kesimpulan dan Rekomendasi

**1** Transformasi dan kepemimpinan mantan teroris seperti Fauzi, Lako, dan Ghazali, membutuhkan dukungan kebijakan integratif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia industri. Para mantan teroris ini telah mengembangkan pusat pendidikan dan pengembangan komunitas bagi para mantan teroris dan kombatan. Termasuk anak-anak yang potensial terpapar radikalisme dan terorisme. Fauzi, Lako dan Ghazali mencoba membantu mereka dalam melupakan pengalaman kekerasan mereka pada masa lalu

13 Wawancara di Nunukan, 1 September 2017.

menuju kegiatan damai dan produktif.

**2** Policy brief ini direkomendasikan khususnya kepada BNPT, Densus 88, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pemerintah daerah untuk membangun kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kaum muda dan mantan teroris dan kombatan melalui program pemberdayaan ekonomi.

**3** Selanjutnya, pada tingkat ASEAN khususnya di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina penting melakukan pencegahan perdagangan manusia dan senjata, dan kebijakan integratif pada level regional dalam program pemberdayaan ekonomi kaum muda sebagai upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme, serta ancaman keamanan di wilayah Asia Tenggara.



### Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta,  
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: pmu.convey@gmail.com | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.  
Resilient nations.